

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi dampak-dampak perekonomian yang merupakan akibat dari krisis global tersebut, seperti menerapkan sistem ekonomi kerakyatan yang merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelolah sumber daya ekonomi apa saja yang dapat di usahakan dan di kuasainya.

Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk kegiatan dari sistem ekonomi yang memperhatikan rakyat kecil dan juga merupakan salah satu wujud dari inisiatif pemerintah dalam menanggulangi krisis global. Hal ini disebabkan UMKM memiliki potensi untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut kebutuhan hidup masyarakat lokal, sehingga dapat dijadikan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Beberapa studi mengenai UMKM yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada masa krisis, usaha skala kecil mempunyai ketahanan relatif lebih baik dibanding usaha besar. Selain berperan sebagai penyangga perekonomian nasional, UMKM berperan positif dalam membuka lapangan kerja maupun mengatasi kemiskinan, terutama di saat banyak usaha besar berguguran.

Pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan suatu program perkreditan yang mampu membantu UMKM untuk lebih meningkatkan usahanya yaitu inpres nomor 6 mengenai Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, yang diikuti dengan adanya nota kesepahaman bersama antara departemen teknis, perbankan, dan perusahaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007 dengan ditandai peluncuran Penjaminan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM. Pada tanggal 5 November 2007, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan tersebut dengan nama kredit usaha rakyat (KUR).

KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjamin untuk usaha produktif yang hanya dapat diakses oleh UMKM dan Koperasi yang memiliki usaha layak. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikannya. Besarnya KUR yang diterima UMKM dan Koperasi dapat mencapai hingga lima ratus juta rupiah. Kredit ini dijamin oleh pemerintah melalui PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT. Sarana Pengembangan Usaha yang saat ini berganti nama menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisinya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun

bank pelaksana yang menyalurkan KUR yaitu bank BRI BTN, BNI, Mandiri, Bukopin dan Bank Syariah.

Diantara beberapa bank pelaksana yang menyalurkan kredit usaha rakyat , Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah bank pelaksana yang menyalurkan KUR terbanyak. Hal ini dikarenakan BRI memiliki jaringan yang luas dibandingkan dengan bank pelaksana lainnya, sehingga memudahkan dalam penyaluran kredit.

BRI adalah salah satu bank terbesar milik negara yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895. Sejak awal berdirinya BRI sudah dekat dengan masyarakat karena BRI merupakan bank yang berkonsentrasi di bidang pertanian, koperasi, dan nelayan. Pencapaian tersebut membuat BRI hingga saat ini dipercaya sebagai bank yang memfasilitasi dunia usaha kecil dan menengah. Selain itu, BRI merupakan bank yang paling mudah diakses oleh masyarakat karena memiliki cabang atau unit yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, dimana dalam pengelolaan usaha pelayanan kreditnya pihak BRI selalu memperhitungkan sifat kehati-hatian, seperti memperhatikan tingkat keberhasilan pihak debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai oleh fasilitas kredit usaha yang diberikan BRI. Pihak BRI telah mempersiapkan pula tata kelola kredit dengan menyusun standar operasional prosedur sebagai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh internal bank untuk menghindari penyebab terjadinya kredit macet yang akan memberikan dampak kerugian bagian pihak bank. Berikut data jumlah penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank BRI (Persero) Cabang Palopo yaitu:

Tabel 1.1 Data Jumlah Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI (Persero) Cabang Palopo Tahun 2020

Tahun	Jumlah Debitur	Jumlah Penyaluran KUR
2020	100 Orang	Rp 23,995,000,000.

Sumber : PT. Bank BRI (Persero) Cabang Palopo

Berdasarkan tabel penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank BRI (Persero) Cabang Palopo menjelaskan bahwa pada tahun 2020 jumlah debitur adalah sebanyak 100 orang/nasabah dan jumlah penyaluran KUR sebesar Rp 23,995,000,000.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai prosedur dan strategi BRI cabang Palopo dalam menganalisis kelayakan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR), hal ini merupakan tahapan untuk mengidentifikasi apakah nasabah layak atau tidak dalam mendapatkan pembiayaan KUR. Tahap ini juga akan menjadi faktor yang membantu pihak internal bank dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai masalah “ **Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Palopo**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana analisis kelayakan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Palopo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis kelayakan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Palopo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Bagi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Palopo yaitu diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerjanya dan strateginya untuk menganalisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan oleh nasabah. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap pembiayaan bermasalah.

b. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh peneliti selama mengikuti perkuliahan dengan permasalahan yang sebenarnya. Sehingga memperoleh gambaran yang jelas sejauh mana tercapainya keselarasan antara pengetahuan secara teoritis dan praktiknya.
- b) Bagi Akademik, diharapkan dapat menambah perbendaharaan pustaka sehingga akan bermanfaat bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan tugas akhir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Permintaan dan Penawaran Kredit

Permintaan dan penawaran yang berhubungan dengan penelitian ini adalah permintaan dan penawaran terhadap kredit usaha rakyat (KUR) pada perbankan.

Adapun pengertian permintaan dan penawaran kredit yaitu:

a. **Permintaan Kredit**

Permintaan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga (Nasroen dan Yasabari, 2007). Permintaan kredit juga dapat diartikan sebagai pinjaman yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana (Suseno dan Piter 2003).

b. **Penawaran Kredit**

Produk yang ditawarkan sebuah bank dalam penawaran kredit adalah uang sehingga penawaran kredit adalah bisa diartikan sebagai penawaran uang kepada masyarakat (Ananda,2018).

Dari pengertian permintaan dan penawaran kredit diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yang menjembatani kepentingan masyarakat dalam hal ini para pelaku usaha yang membutuhkan pinjaman (peminjam atau debitor), jika permintaan kredit masyarakat tinggi maka semakin tinggi pula suku bunganya,

dan semakin rendah penawaran kredit maka semakin rendah pula permintaan kredit.

2.2 Kredit

2.2.1 Defenisi Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan (*trust*) oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (*debitur*) dimana yang akan datang akan sanggup memenuhi segala kewajiban yang telah di perjanjikan terlebih dahulu.

Menurut pasal 1 ayat 11 undang-undang RI No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang kewajibannya pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Oleh karena itu, dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Pengertian pinjaman (kredit) menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Abdullah & Tantri, 2014).

2.2.2 Fungsi Kredit

Menurut (Kasmir, 2013) fungsi kredit sebagai berikut:

a. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.

b. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menabuh jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

f. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memegang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

g. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di pabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik.

h. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit.

2.2.3 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut (Kasmir, 2013)terdapat lima faktor penilaian permohonan kredit yang perlu diperhatikan oleh Bank antara lain :

a. Kepribadian atau Watak (*Character*)

Character adalah sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

b. Kemampuan atau Kesanggupan (*Capacity*)

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. Modal atau Kekayaan (*Capital*)

Capital adalah menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

d. Jaminan (*Collateral*)

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

e. Kondisi (*Condition*)

Condition adalah penilaian kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative.

2.2.4 Defenisi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif dan layak (*feasible*) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan (Widiastuti & Rita, 2017). KUR mensyaratkan bahwa agunan pokok kredit adalah proyek yang dibiayai. Namun karena agunan tambahan yang dimiliki oleh UMKM-K pada umumnya kurang, maka sebagian di-cover dengan program penjaminan. Besarnya *coverage* penjaminan maksimal 70 % dari *plafond* kredit. Dimana sumber dana KUR sepenuhnya berasal dari dana komersial bank.

KUR adalah kredit dari perbankan dengan *plafond* maksimum 5 juta yang mendapatkan jaminan sebesar 70% dari PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO), dana yang disalurkan melalui KUR Mikro ini sepenuhnya menggunakan dana perbankan serta pelaksanaannya mengacu pada UU perbankan.

Dari definisi-definisi KUR dapat disimpulkan bahwa kredit usaha rakyat (KUR) adalah bagian dari program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung

pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang layak usahanya untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan dari kreditur, namun kurang memiliki jaminan yang dipersyaratkan oleh kreditur. Sasaran KUR adalah koperasi dan UKM yang membutuhkan pendanaan dan dinyatakan layak oleh lembaga keuangan, namun belum memiliki agunan cukup sesuai dengan ketentuan persyaratan pembiayaan. KUR terbagi dua yaitu KUR ritel yaitu KUR yang memiliki *plafond* maksimal Rp.500 juta dan KUR mikro yaitu KUR yang memiliki *plafond* maksimal 5 juta Tujuan akhir diluncurkan program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Ada enam bank yang menjadi penyalur KUR termasuk mikro yaitu bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bank Syariah Mandiri serta Bank Bukopin. Adapun aturan yang terkait KUR adalah:

- a. Peraturan presiden No. 2 Tahun 2008 tentang lembaga penjamin (Kusmuljono, 2009)
- b. Keputusan Menko Bidang Perekonomian N0.KEP-05/M.Ekon/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit atau pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. (Kusmuljono, 2009)
- c. Landasan operasional KUR menurut Inpres No.6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM dan Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditanda tangani pada tanggal 9 Oktober 2007.

Terdapat beberapa cara pemerintah dalam mengkoordinasi kebijakan KUR menurut Departemen Kementrian dan UMKM (2007) yaitu :

- a. Dalam rangka mengkoordinasikan program KUR, pemerintah membentuk Komite Kebijakan.
- b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan instansi pembina mengkoordinasikan kebijakan penjamin kredit.
- c. Hal-hal yang dikoordinasikan:
 1. Penyiapan UMKM dan Koperasi sesuai dengan kewenangan instansi pembina.
 2. Kebijakan dan prioritas bidang usaha.
 3. Pembinaan dan pendampingan UMKM dan Koperasi.
 4. Koordinasi penyaluran KUR dengan perbankan dan perusahaan penjamin.
 5. Sosialisasi program dan koordinasi dengan daerahkebijakan penjamin kredit

2.2.5 Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penyaluran kredit usaha Rakyat (KUR) diatur oleh pemerintah melalui peraturan menteri keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan kredit usaha rakyat yang telah diubah dengan Peraturan menteri keuangan No.10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut :

- a. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan ketentuan :
 1. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur

- (SID) pada saat permohonan kredit diajukan atau belum pernah memperoleh fasilitas kredit program dari Pemerintah
2. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal nota kesepakatan bersama (MoU) penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya
 3. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan
- b. KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja investasi dengan ketentuan :
1. Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 24% efektif pertahun.
 2. Untuk kredit di atas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 16% efektif pertahun.
- c. Bank pelaksana memutuskan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

2.2.6 Tujuan dan Fungsi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tujuan program KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Pada dasarnya, KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. Perseorangan, kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum Rp 500 juta. Sumber dana adalah bank yang ditunjuk dengan tingkat bunga maksimum 16 persen per tahun. Persentase kredit yang dijamin adalah 70 persen dari alokasi total kredit yang disediakan oleh bank tersebut. Masa pinjam kredit untuk modal kerja maksimum 3 tahun dan 5 tahun untuk investasi. Untuk agribisnis, bidang usaha yang layak adalah input produksi hingga penyediaan alat dan mesin pertanian, aktivitas on-farm, dan pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian.

2.2.7 Tingkat bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pada saat ini suku bunga kredit untuk KUR adalah sebesar 16%. Kredit usaha rakyat adalah kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan kredit ini diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai bank. Pemerintah mensubsidi kredit KUR dengan tujuan memberdayakan usaha mikro dan kecil (UMK) yang ada di Indonesia.

2.2.8 Keunggulan dan Kekurangan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

a. Keunggulan KUR

- a) Proses pengajuan yang cepat
- b) Syarat- syarat mudah
- c) Suku bunga yang bersaing
- d) Jangka waktu pelunasan mencapai hingga 4 tahun
- e) Bunga yang diberikan sangat rendah yaitu hanya sebesar 5% per tahun

b. Kekurangan KUR

- a) Tidak semua KUR yang ada bisa diajukan tanpa jaminan
- b) Adapun yang menggunakan jaminan seperti BPKP motor maupun mobil, sertifikat rumah, maupun aset berharga lainnya.
- c) Sebelum proses pencairan dilakukan survey usaha terlebih dahulu
- d) Survey usaha pastinya untuk melihat usaha yang sudah berjalan apakah usaha Anda layak mendapatkan pinjaman atau tidak. Mungkin proses ini akan memperlama pencairan dana KUR
- e) Jaminan akan kembali apabila pelunasan sudah selesai dari jangka waktu yang ditentukan
- f) Jaminan yang diberikan baru akan kembali jika kredit yang Anda pinjam sudah lunas dengan waktu yang ditentukan, dan apabila waktu yang ditentukan lama maka akan lama juga jaminan berada di bank tersebut.

2.3 Penelitian terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dapat diberi gambaran hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan antara lain :

Table 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Shanty Dwiani, 2018)	Strategi Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank Bri Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis Jakarta	Prosedur Pembiayaan (Variabel Bebas), Kelayakan Pembiayaan (Variabel Bebas), Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Variabel Bebas)	Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam prosedur pembiayaan BRI Syariah KCI Abdul Muis sangat cepat sesuai SLA hanya 1-3 hari dan persyaratannya pun mudah untuk dipenuhi masyarakat. h.
2	(Nugrahaeny, 2011)	Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia	Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Variabel Bebas)	Hasil analisis menunjukkan bahwa KUR pada BRI secara umum menentukan ketentuan prosedur pemberian KUR yang ditentukan oleh pemerintah.
3.	(Yuliana Safitri, Titin Ruliana, 2016)	Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Air Putih Cabang Samarinda	Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Variabel Bebas)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses analisis kelayakan pemberian kredit usaha rakyat yang telah dilaksanakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Air Putih Cabang Samarinda telah berjalan baik dimana manajemen perkreditan telah diterapkan sesuai

				dengan peraturan Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR (1995).
4.	(Lapia et al., 2017)	Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro Dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sawojajar Malang)	Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro (Variabel Bebas)	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa analisis kelayakan pemberian kredit dengan prinsip 3R dan penilaian keseluruhan sudah baik tetapi belum dilakukan penilaian karakter.
5.	(Ratnaningtyas, 2016)	Evaluasi Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat Untuk Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Kawi Malang)	Kredit, Program Kredit Usaha Rakyat, Kredit Bermasalah (Variabel Bebas)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan analisis yang telah dilakukan oleh BRI Cabang Kawi Malang sudah cukup baik, namun bank perlu menganalisis dengan hati-hati dan lebih mendalam. Selain itu adanya peningkatan Non Performing Loan menjadi peringatan yang harus diwaspadai oleh bank. Bank perlu mempertimbangkan untuk menggunakan analisis 6C.
6.	(Nurul Wardhani, 2010)	Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombang.	Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Variabel Bebas)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang melalui beberapa tahapan yaitu tahap permohonan, tahap pemeriksaan atau analisis kredit, pemberian putusan, dan tahap akad kredit/ pencairan kredit.

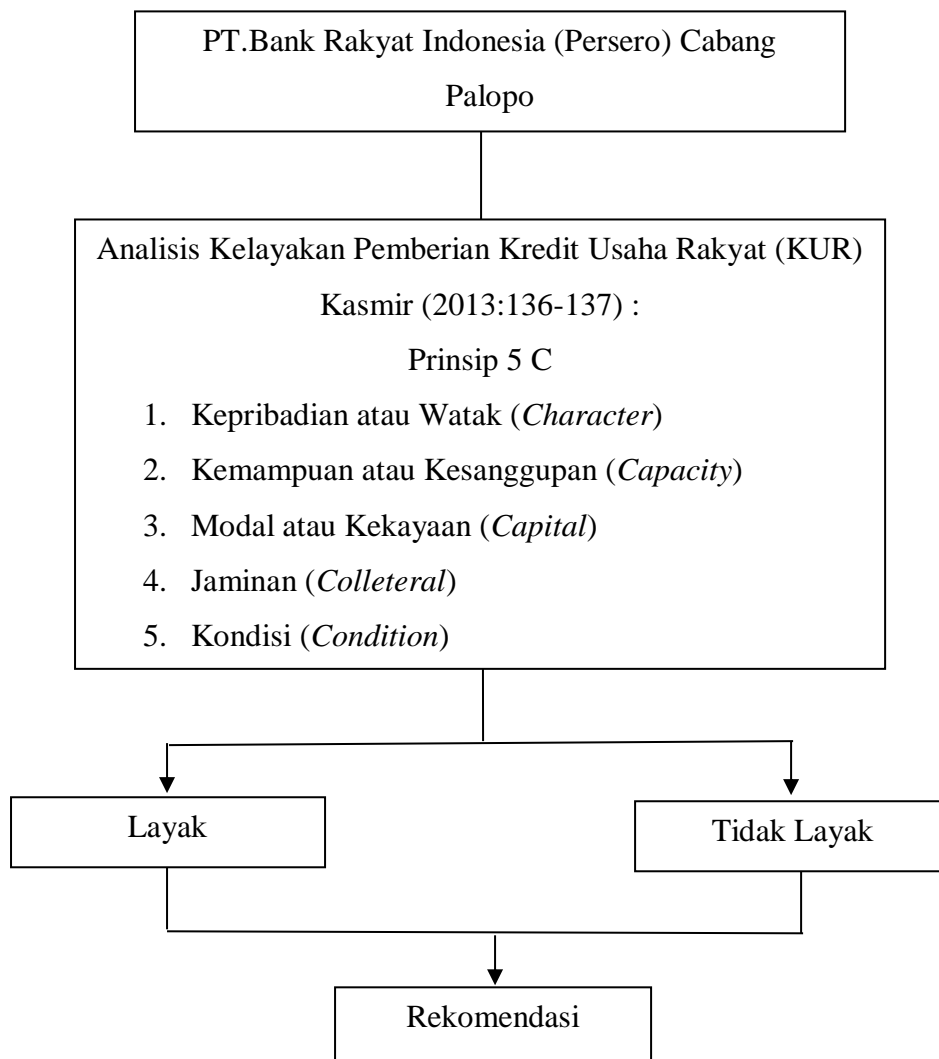
7.	(Astarman, 2018)	Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Pada Btm Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.	Kelayakan Pemberian Kredit (Variabel Bebas)	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis prinsip 7C untuk menguji kelayakan pemberian kredit pada BTM Rengat diantaranya: penilaian aspek: <i>character, capacity, capital, collateral, conditions of economy, constraint</i> telah dilaksanakan oleh BTM Rengat dengan baik dan sesuai dengan SOP yang dimiliki BTM Rengat.
8.	(Pratama & Fernos, 2010)	Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Nagari Cabang Padang	Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Variabel Bebas)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur pemberian pinjaman usaha rakyat kepada PT. Bank Nagari Cabang Padang antara lain, pertama, calon peminjam mengajukan kredit. kedua, departemen pemasaran memeriksa kelengkapan dokumen. Ketiga, melakukan tinjauan lokasi bisnis. Keempat, jika kredit disepakati, legal Petugas akan diberi perintah ke bagian notaris dan perjanjian kredit notaris dibuat, hanya setelah itu pencarian kredit.
9.	(Nadhia Azmi, 2017)	Peranan Kredit Usaha Rakyat Untuk Pengembangan UMKM	Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Variabel Bebas)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)

				baik mikro maupun ritel dilakukan melalui tahap permohonan kredit dengan cara calon debitur yang akan mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) diharuskan membawa serta syarat – syarat seperti fotokopi KTP ,fotokopi KK ,surat keterangan usaha ,neraca dan laporan laba rugi yang diserahkan kepada pihak bank.
10.	(Legal & Ariffin, 2019)	Tinjauan Atas Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kacab Bumiayu.	Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Variabel Bebas)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian kredit usaha rakyat pada Bank BRI Kabtor Cabang Bumiayu terdiri dari beberapa proses, yaitu proses permohonan kredit, . Kemudian Bank BRI Cabang Bumiayu akan melakukan analisa kredit. . Selanjutnya, Bank BRI Cabang Bumiayu akan memberikan keputusan kredit. Setelah perjanjian kredit diberikan, maka dilakukan pencairan kredit.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran secara skematis tentang arah penelitian yang dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diketahui skema

penelitian yang memberikan gambaran layak atau tidaknya pemberian suatu kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank BRI dengan menggunakan Peraturan Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR (1995). Berikut merupakan model kerangka konseptual, yaitu:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif adalah pengukuran data yang dilakukan dengan menginterpretasikan data, menjelaskan data dengan menggunakan kalimat sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada kantor Bank Rakyat Indonesia cabang Palopo di JL.K.H.M, Ramli No.2 Kota Palopo. Waktu Penelitian dilakukan dari bulan Juni-Agustus 2020.

3.3 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada nasabah yang mengambil dana KUR pada PT. Bank BRI Persero (Cabang Palopo).

3.4 Metode Pengumpulan data

- a. Wawancara yaitu proses cara pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan antara peneliti (atau orang yang ditugasi) dengan subyek

penelitian atau responden atau sumber data. Dalam hal ini pewawancara menggunakan percakapan sedemikian hingga yang diwawancara bersedia terbuka mengeluarkan pendapatnya. Biasanya yang diminta bukan kemampuan tetapi informasi mengenai sesuatu.

- b. Observasi adalah kemampuan dalam menentukan factor-faktor awal mula perilaku dan kemampuan untuk melukiskan secara akurat reaksi individu yang diamati dalam kondisi tertentu.
- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa jumlah nasabah pada PT. Bank BRI Persero (Cabang Palopo).
- d. Studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur dan majalah yang berhubungan atau berkaitan dengan pembuatan laporan.

3.5 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006: 130). Dengan menetapkan populasi, ini dimaksudkan agar suatu penelitian dapat mengukur sesuatu sesuai dengan kasusnya dan tidak berlebihan dengan populasi yang diacu. Maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah atau debitur yang menggunakan dana kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. BRI (Persero) Cabang Palopo yaitu 100 nasabah.

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006) Sampel yang diambil dari populasi yang ada, selanjutnya disebut responden. Sesuai dengan pemahaman diatas, maka sampel dalam

penelitian ini adalah sebagian atau wakil dari populasi yang dipilih. Untuk menentukan jumlah sampel maka digunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% ketentuan sebagai berikut (Umar, 2005):

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Dimana :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Nilai tingkat kesalahan

Dengan populasi sebesar 100 maka jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu :

$$\begin{aligned} n &= \frac{100}{1+100(0,1)^2} \\ &= 50 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Slovin maka jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 50 nasabah. Responden yang dijadikan sampel adalah nasabah yang mengambil dana KUR pada tahun 2015 yang sampai sekarang angsurannya masih berjalan sampai tahun 2020.

3.6 Metode Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2015) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 dan berupa kuisioner dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang mendasari keputusan pemberian kredit. Untuk kepentingan hasil perhitungan presentase, penulis akan menggunakan ketentuan yang dikemukakan berdasarkan rumusan champion yang dikutip dalam bukunya (Yuliana Safitri, Titin Ruliana, 2016) *Basic Statistic For Social Research* menyebutkan klasifikasi sebagai berikut:

0,00-0,25	= Tidak ada Asosiasi / Asosiasi Lemah (<i>No Association or low / weak Association</i>)
0,26-0,50	= Asosiasi Cukup Rendah (<i>Moderately low association</i>)
0,51-0,75	= Asosiasi Cukup Tinggi (<i>Moderately high association</i>)
0,76-1,00	= Asosiasi tinggi / asosiasi kuat hingga asosiasi sempurna (<i>High association / strong association up to perfect association</i>).

3.6 Defenisi Operasional

- a. Kredit Usaha Rakyat merupakan bagian dari program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang layak usahanya untuk mendapatkan fasilitas kredit atau

pembiayaan dari kreditur, namun kurang memiliki jaminan yang dipersyaratkan oleh kreditur.

- b. Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank yang berkonsentrasi di bidang pertanian, koperasi, dan nelayan yang hingga saat ini masih dipercaya sebagai bank yang memfasilitasi dunia usaha kecil dan menengah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Bank BRI

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik Pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wijaatmaja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto”, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi).

Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948 kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam

ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II 31 sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia unit II dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

4.1.2 Visi dan Misi Bank BRI

a. Visi Bank BRI

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

b. Misi Bank BRI

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menjunjung peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance* (GCG) yang sangat baik.
3. Memberikan keuntungan yang manfaat dan optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Bank BRI Cabang Palopo

a. Struktur Organisasi

Organisasi adalah suatu wadah yang didalamnya terdapat suatu system yang mengatur masalah pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing anggotanya. Struktur organisasi menunjukkan tanggung jawab dan pembagian wewenang (*authority*) dan hubungan antara bagian-bagian dalam perusahaan secara jelas. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas akan tercipta suatu koordinasi kerja yang efektif yang mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Struktur organisasi suatu perusahaan dipengaruhi tujuan dan kegiatan operasi perusahaan.

Organisasi timbul atau terjadi apabila dua orang atau lebih bersama-sama menjalankan pekerjaan untuk kepentingan bersama. Organisasi merupakan penggabungan manusia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Sedangkan sebagai fungsi suatu proses merincikan tugas dan kewajiban serta memberikan pendelegasian kekuasaan dengan mengadakan kerjasama baik secara vertikal maupun horizontal. Adapun struktur organisasi dari PT. Bank BRI (Persero) Cabang Palopo.

b. Uraian Tugas

1. Pimpinan Cabang

Bertanggung jawab untuk:

- a) Melaksanakan misi Kantor Cabang serta keseluruhan, yaitu membantu Direksi untuk memperoleh laba yang wajar melalui satu penyediaan produk dan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat di daerah kerja cabang, mendorong pemberdayaan ekonomi serta berfungsi sebagai pengelola uang daerah, dalam rangka mewujudkan Bank yang berkembang secara sehat, dinamis, mandiri, dan terpercaya serta memberikan kontribusi yang nyata terhadap pendapatan asli daerah.
- b) Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur.
- c) Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola bisnis di wilayah kerja Cabang.
- d) Merencanakan, mengembangkan serta mengelola layanan unggul kepada nasabah.
- e) Memberikan kontribusi yang nyata untuk mendorong pemberdayaan ekonomi.
- f) Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undang lainnya yang berlaku.

g) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatan.

2. Asisten Manajer Operasional (AMO)

Tugas Asisten Manajer Operasional yaitu:

- a) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan usaha Bank.
- b) Mengatur operasional Kantor Cabang.

3. Account Officer (AO) Komersial

Bertugas mencari nasabah pinjaman dengan jaminan harta perusahaan atau bisnis yang sedang dijalankan perusahaan tersebut.

4. Account Officer (AO) Briguna

Bertugas mencari nasabah pinjaman dengan jaminan Surat Keputusan Kepegawaian.

5. Seksi Penunjang Operasional (SPO)

Supervisor yang mengurus SDM logistik dan IT Perusahaan Kantor Cabang BRI tersebut.

6. Teller

Petugas yang melayani penyetoran dan pengambilan uang secara manual, disamping ATM.

7. Customer Service

Petugas yang bertugas menangani pembukaan rekening, giro, dan jasa Bank lainnya.

8. Informasi dan Teknologi (IT) A Channel

Bertugas mengurus semua yang berhubungan dengan IT.

9. Pramubakti

OB Merangkap Kurir (Biasanya dibantu beberapa *cleaning service*)

10. Security

- a) Mengawasi seluruh wilayah Bank dari radius lokal Bank sampai dengan pintu masuk dari ruangan dalam bank.
- b) Membuka pintu, menyambut, dan memberi salam dengan ramah setiap nasabah yang akan masuk ke dalam bank.
- c) Menanyakan keperluan nasabah dan memberikan nomor antrian kepada nasabah sesuai dengan keperluan nasabah.
- d) Memperhatikan seluruh kegiatan di dalam dan di luar bank, segera sigap bertindak jika ada sesuatu yang mencurigakan.

4.2 Analisis Deskriptif

4.2.1 Karakteristik Responden/Nasabah Bank BRI Cabang Palopo

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	29
2	Perempuan	21
Jumlah		50

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa nasabah yang menjadi responden pada penelitian ini berjumlah 50 orang, responden yang berjenis

kelamin laki-laki yang lebih dominan sebanyak 29 orang sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 21 orang.

b. Responden Berdasarkan Bidang Usaha, Penghasilan dan Lama Kredit

Tabel 4.2 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Bidang Usaha, Penghasilan Jumlah Kredit dan Lama Kredit

No	Bidang Usaha	Jumlah Kredit Rp	Lama Kredit /Tahun
1	Menjual Barang Campuran	250.000.000	4
2	Toko Kue	100.000.000	3
3	Menjual Barang Campuran	350.000.000	4
4	Usaha Batu Bata	200.000.000	2
5	Menjual Barang Campuran	100.000.000	4
6	Toko Campuran dan BRI Link	150.000.000	3
7	Menjual Pakaian dan Counter	300.000.000	4
8	Counter HP	100.000.000	3
9	Warung Makan	150.000.000	3
10	Pedagang Campuran	200.000.000	3,5
11	Bengkel Motor	200.000.000	3
12	Menjual Aksesoris	150.000.000	4
13	Menjual Barang Campuran	150.000.000	4
14	Counter HP	200.000.000	2
15	Warung Makan	400.000.000	4
16	Counter HP	100.000.000	3
17	Bengkel Mobil	150.000.000	3
18	Bengkel Mobil	100.000.000	2
19	Meubel	250.000.000	3
20	Warung Makan	100.000.000	3
21	Toko Baju	150.000.000	2
22	Toko Barang Campuran	200.000.000	4
23	Counter HP	100.000.000	3
24	Bengkel Motor	150.000.000	4
25	Toko Pecah Belah	100.000.000	3
26	Penjual Ikan	150.000.000	4
27	Toko Sembako	300.000.000	4
28	CV. Kontraktor	500.000.000	4
29	Pabrik Tempe dan Tahu	350.000.000	4
30	Toko Sembako	200.000.000	3
31	Usaha Ayam Potong	150.000.000	4
32	Warung Kopi	350.000.000	3
33	Gudang Rumput Laut	250.000.000	2,5
34	Penjual Pakaian	150.000.000	3

35	Usaha Batu Bata	250.000.000	4
36	Toko Bangunan	450.000.000	3
37	Toko Barang Campuran	100.000.000	3
38	Toko Kue	150.000.000	4
39	Bengkel	200.000.000	4
40	Toko Sembako	100.000.000	2,5
41	Warung Makan	150.000.000	3,5
42	Counter HP	100.000.000	4
43	Toko Pakaian	200.000.000	3,5
44	Toko Kue	100.000.000	3
45	Pabrik Gula	100.000.000	4
46	Pabrik Tahu	150.000.000	4
47	Toko Olahraga	300.000.000	4
48	Agen BRI Link	250.000.000	3
49	Penjual Ikan	75.000.000	4
50	Warung Makan	100.000.000	4

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 50 nasabah atau responden, terdapat 1 (satu) orang nasabah yang mengambil kredit sebesar Rp 75.000.000, 14 (empatbelas)nasabah yang mengambil kredit sebesar Rp 100.000.000, 13 (tigabelas) nasabah yang mengambil kredit sebesar Rp 150.000.000, 8 (delapan) nasabah yang mengambil kredit sebesar Rp 200.000.000, 5 (lima) nasabah yang mengambil kredit sebesar Rp 250.000.000, 3 (tiga) nasabah yang mengambil kredit sebesar Rp 300.000.000, 3 (tiga) nasabah yang mengambil kredit sebesar Rp 350.000.000, 1 (satu) nasabah yang mengambil kredit sebesar Rp 400.000.000, 1 (satu) nasabah yang mengambil kredit sebesar Rp 450.000.000, dan 1 (satu) nasabah yang mengambil kredit sebesar Rp 500.000.000. Tabel diatas juga menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) nasabah dengan lama kredit selama 2 tahun, 2 (dua) nasabah dengan lama kredit selama 2,5 tahun, 18 (delapanbelas) nasabah dengan lama kredit selama 3 tahun, 3

(tiga) nasabah dengan lama kredit selama 3,5 tahun, dan 23 (duapuluh tiga) nasabah dengan lama kredit selama 4 tahun.

4.2.2 Analisis Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif. Metode yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dan dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Penilaian dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada 50 orang nasabah yang mengajukan kredit tentang proses analisis kelayakan pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak bank.

a) Aspek *Character* (Karakter)

Character adalah sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Berikut adalah jawaban responden tentang kelayakan pemberian kredit usaha rakyat pada BRI Cabang Palopo berdasarkan aspek *Character* yaitu:

Tabel. 4.3 Jawaban Responden terhadap aspek *character*

No	Pernyataan	Kategori Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah sebelumnya anda pernah mengambil KUR	50	0
2	Apakah anda pernah bermasalah dalam pengambilan KUR	0	50
3	Apakah anda pernah terlambat melakukan pembayaran dalam KUR	0	50
4	Keterangan tentang aktivitas sehari-hari	31	19
5	Apakah pihak Bank memerlukan informasi kepada rekan atau tetangga untuk mengenal anda	37	13
Jumlah Jawaban		118	132

Sumber: Data olahan 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat menjelaskan bahwa pada aspek *character* berdasarkan pernyataan pertama 50 responden menjawab ya, bahwa mereka sebelumnya pernah mengambil KUR, artinya dalam menganalisis kelayakan pemberian KUR pihak Bank BRI Cabang Palopo lebih mengutamakan nasabah yang sudah pernah mengambil KUR karena akan lebih mudah mengetahui *character* nasabahnya berdasarkan pengalaman pihak Bank dengan nasabah yang sudah pernah mengambil KUR sebelumnya, pada pernyataan kedua dan ketiga 50 responden menjawab tidak, hal tersebut menjelaskan bahwa dalam menganalisis kelayakan pemberian KUR pihak Bank BRI Cabang Palopo sangat memperhatikan calon nasabah atau nasabah yang pernah bermasalah dan terlambat melakukan pembayaran dalam KUR. Pada pernyataan keempat 31 reponden menjawab ya dan 19 reponden yang menjawab tidak, artinya bahwa dalam menentukan kelayakan pemberian KUR Bank BRI Cabang Palopo masih memperhatikan kegiatan sehari-hari dari responden dan pada pernyataan kelima 37 reponden menjawab ya dan 13 reponden menjawab tidak, artinya bahwa pihak Bank masih memerlukan informasi yang detail tentang nasabah.

b) Aspek *Capacity* (Kemampuan dan Kesanggupan)

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Berikut adalah jawaban responden tentang kelayakan pembeian KUR berdasarkan aspek *capacity* yaitu:

Tabel. 4.4 Jawaban Responden Terhadap Aspek *Capacity*

No	Pernyataan	Kategori Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah anda melampirkan laporan keuangan tiap bulan	50	0
2	Apakah anda memberikan informasi mengenai hasil atau pendapatan lainnya	50	0
3	Apakah anda memberikan informasi mengenai pendapatan bersih tiap bulan	50	0
Jumlah Jawaban		150	0

Sumber: Data Olahan 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada aspek *capacity* untuk semua pernyataan 50 responden menjawab ya. Artinya bahwa dalam menganalisis kelayakan pemberian KUR, pihak Bank BRI Cabang Palopo sangat memperhatikan kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam menyelesaikan kreditnya dimana nasabah harus melaporkan laporan keuangan ditiap bulan, dan memberikan informasi seberapa besar pendapatan bersih dan hasil atau pendapatn lain perbulan dari nasabah.

c) Aspek *Capital* (Modal)

Capital adalah menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman. Berikut adalah jawaban responden tentang kelayakan pembeian KUR berdasarkan aspek *capital* yaitu:

Tabel. 4.5 Jawaban Responden Terhadap Aspek *Capital*

No	Pernyataan	Kategori Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah pihak bank meminta data pendapatan perbulan dari anda	50	0
2	Apakah anda dimintai data mengenai sumber-sumber pendapatan anda	50	0
3	Apakah pihak bank memerlukan informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran belanja anda	50	0
Jumlah Jawaban		150	0

Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa pada aspek *capital* untuk 3 pernyataan 50 responden menjawab ya, artinya bahwa dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit pihak Bank BRI Cabang Palopo perlu meminta data pendapatan perbulan, sumber-sumber pendapatan nasabah, serta mengenai pendapatan keseluruhan dan belanja perbulan nasabah.

d) Aspek *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Berikut adalah jawaban responden tentang kelayakan pembeian KUR berdasarkan aspek *collateral* yaitu:

Tabel.4.6 Jawaban Responden Terhadap Aspek *Collateral*

No	Pernyataan	Kategori Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Pihak bank meminta bukti jaminan berupa STNK, BPKB, dll	50	0
2	Pihak bank meminta informasi mengenai keadaan atau kondisi jaminan	50	0
3	Pihak bank meminta jaminan dan data mengenai jaminan untuk dibawa	50	0
Jumlah Jawaban		150	0

Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa pada aspek *collateral* untuk 3 pernyataan 50 responden menjawab ya, artinya bahwa dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit pihak Bank BRI Cabang Palopo perlu meminta jaminan berupa STNK, BPKB dan jaminan lainnya lalu kemudian pihak bank meminta jaminan tersebut untuk dibawa dan diperiksa kelayakannya.

e) Aspek *Conditional* (Kondisi)

Condition adalah penilaian kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Berikut adalah jawaban responden tentang kelayakan pemberian KUR berdasarkan aspek *conditional* yaitu:

Tabel. 4.7 Jawaban Responden Terhadap Aspek *Conditional*

No	Pernyataan	Kategori Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah pihak bank meminta informasi mengenai keuangan anda	50	0
2	Pihak bank meminta laporan keuangan perusahaan anda yang menunjukkan kondisi perusahaan	50	0
3	Apakah pihak bank memeriksa kondisi barang jaminan jika ada	50	0
Jumlah Jawaban		150	0

Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa pada aspek *conditional* untuk 3 pernyataan 50 responden menjawab ya, artinya bahwa dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit pihak Bank BRI Cabang Palopo harus sangat memperhatikan informasi keuangan nasabah melalui laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan agar dapat diketahui sejauh mana progress dari perusahaan yang dijalankan oleh para nasabah.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan prinsip 5C yang telah diperoleh dari BRI Cabang Palopo untuk mengetahui kelayakan pemberian kredit KUR, maka analisis dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner dikategorikan dengan jawaban “Ya” atau “Tidak”. Jika persentase jawaban “Ya” lebih besar berarti tidak terdapat kelemahan potensial dalam kelayakan pemberian kredit KUR pada BRI Cabang Palopo. Sedangkan jika jawaban “Tidak” lebih besar berarti terdapat kelemahan dalam kelayakan pemberian kredit pada Cabang Palopo. Kuesioner dengan 17 butir pertanyaan, hasil perhitungan kuesioner dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden

Jumlah Pertanyaan	Kategori Jawaban	
	YA	TIDAK
850	718	132

Sumber : Data Olahan 2020

Dari data tabel diatas dapat dihitung persentase untuk menentukan layak atau tidaknya pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank BRI (Persero) Cabang Palopo. Persentase tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus menurut champion yang dikutip dalam bukunya (Yuliana Safitri, Titin Ruliana, 2016) sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah Jawaban}} \times 100\% \\
 &= \frac{718}{850} \times 100\% \\
 &= 85\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungannya menunjukkan bahwa persentase sebesar 85% masuk kategori *High association (strong association up to perfect association)* yang dapat diartikan bahwa analisis kelayakan pemberian kredit pada BRI Cabang Palopo sudah memiliki hubungan asosiasi yang tinggi dengan artian bahwa sudah sangat layak dan sangat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum dan peraturan Bank Indonesia No 27/162/KEP/DIR (1995).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank BRI (Persero) Cabang Palopo sudah layak atau berjalan dengan baik.

4.2.3 Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank BRI (Persero) Cabang Palopo

Pada Bank BRI Cabang Palopo terdapat dua jenis KUR, yaitu KUR Mikro dan KUR Ritel. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya membahas tentang KUR Ritel karena penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat di Kantor Cabang hanya melayani jenis KUR Ritel. Plafond kredit untuk KUR Ritel yaitu mulai dari Rp 50 Juta sampai dengan Rp 500 Juta.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank BRI Kantor Cabang Palopo, dapat mengemukakan bahwa proses pemberian kredit usaha rakyat jenis KUR Ritel adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Kredit.

Pengajuan permohonan dapat dilakukan secara tertulis, dilampirkan dengan:

- a. Copy Legalitas calon debitur Yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK).
- b. Copy Perijinan calon debitur yaitu berupa TDP, SIUP, SITU, atau dapat digantikan dengan surat keterangan usaha dari Lurah.
- c. Data usaha dan dokumen yang diperlukan untuk analisa kebutuhan kredit. Calon debitur diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Bagi usaha baru, minimal usaha telah berjalan selama 6 bulan dan dituangkan dalam laporan kunjungan nasabah (LKN) berdasarkan atas hasil pemeriksaan (*on the spot*) yang telah dilakukan AO.

2. Dilakukan Analisa Kredit

Bank BRI Cabang Palopo harus melakukan analisa kredit terlebih dahulu sebelum menyalurkan kredit. Analisa kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh *Account Officer* terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk menjamin permohonan kredit.

Tujuan dari analisa kredit yaitu untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemauan debitur membayar kembali kreditnya kepada Bank. Pada tahap ini, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI Kantor Cabang Bumiayu akan melakukan cheking antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pemohon. Selanjutnya BRI Cabang Palopo melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur serta segala sesuatu yang telah disyaratkan dalam hubungannya dengan informasi-informasi dan usaha calon debitur. Informasi ini

diperoleh melalui banyak cara, yaitu dengan menanyakan kepada tetangga terdekat dari tempat tinggal atau tempat usaha calon debitur tersebut.

Dalam hal ini, yang bertugas untuk melakukan analisis dan pengamatan langsung kepada calon debitur adalah *Account Officer* (AO). Hasil analisa dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) sebagai dasar pertimbangan bagi pemutus dalam memberikan putusan kredit.

3. Pemberian Keputusan Kredit

Calon debitur akan memperoleh keputusann kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.

4. Perjanjian Kredit

Calon debitur datang langsung ke Bank BRI Kantor Cabang Palopo berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh pihak Bank. Setelah disetujui, debitur menandatangani surat perjanjian yang telah disediakan oleh pihak Bank BRI Kantor Cabang Palopo.

Dalam perjanjian kredit ini, akan disebutkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dalam perjanjian kredit, Debitur dengan tegas menyatakan:

- a) Bersedia memberikan setiap keterangan-keterangan dengan sebenar benarnya yang diperlukan oleh Bank untuk kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh bank terutama mengenai kebijaksanaan pemberian pinjaman.

- b) Bahwa pinjaman yang diterima dari Bank tersebut akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan sebagaimana yang telah diuraikan, dan setiap waktu Bank berhak memeriksa penggunaan pinjaman tersebut.
- c) Bilamana pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain, maka Bank berhak dengan seketika menagih pinjamannya, dan debitur diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, tambahan bunga, denda, biaya-biaya, dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul, dengan seketika dan sekaligus lunas.
- d) Bilamana debitur tidak membayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, bank berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas permintaan bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan, debitur dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan atau mengosongkan barang dan jaminan sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian pemberian kredit.
- e) Bersedia membayar seluruh pokok pinjaman beserta bunga, denda, ongkos-ongkos sampai pinjaman dinyatakan lunas oleh Bank.

5. Pencairan Kredit

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit, maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan. Dana tersebut dimasukkan ke dalam rekening tabungan debitur, dan debitur bisa menarik dana tersebut di setiap kantor BRI. Waktu lamanya proses

permohonan kredit usaha rakyat hingga tahap pencairan dana yaitu 6 hari kerja.

Persyaratan-persyaratan pencairan kredit yaitu :

- a) Perjanjian KUR dan akta-akta lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SP2K) telah ditandatangani.
- b) Seluruh biaya realisasi KUR yang dipersyaratkan dalam Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SP2K) telah dipenuhi.
- c) Terdapat permohonan pencairan KUR yang ditandatangani oleh debitur khusus untuk badan usaha, penandatanganan manadilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan dalam Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan :

1. Secara keseluruhan proses analisis kelayakan pemberian kredit usaha rakyat yang telah dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Palopo telah berjalan dengan baik atau sudah layak karena pemberian KUR sangat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum dan peraturan Bank Indonesia No 27/162/KEP/DIR (1995).
2. Proses pemberian kredit usaha rakyat jenis KUR Ritel yaitu :
 - a. Permohonan Kredit
 - b. Dilakukan Analisa Pemberian Kredit
 - c. Pemberian Keputusan Kredit
 - d. Perjanjian Kredit
 - e. Pencairan Kredit

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yaitu :

1. Manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Palopo sebaiknya mempertahankan perkreditan yang sudah berjalan dengan baik untuk meningkatkan kinerja dan kualitas.
2. Sebaiknya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Palopo perlu mengkaji ulang dan memilih sumber daya manusia yang berkompeten dibidang perkreditan sehingga mampu menyalurkan program kredit usaha rakyat (KUR) dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., & Tantri, F. (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Edisi I. Cet. Iii.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*.
- Astarman, A. (2018). Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Pada Btm Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7(3), 87–93. <https://doi.org/10.34006/Jmb.V7i3.17>
- Kasmir. (2013). Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Kusmuljono, B. S. (2009). *Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha. Hybrid Microfinancing*. Ipb Press: Bogor.
- Lapia, S., Dzulkirom Ar, M., & Zahroh Z. A, Z. (2017). Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro Dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sawojajar Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 51(2), 179–187.
- Legal, E. M., & Ariffin, M. (2019). Tinjauan Atas Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Bri) Kacab Bumiayu. *May*. <https://doi.org/10.13140/Rg.2.2.21910.19526>
- Nadhia Azmi. (2017). Peranan Kredit Usaha Rakyat Untuk Pengembangan Umkm. 55.
- Nasution Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Media Group, 2006, h. 80.
- Nugrahaeny, D. (2011). Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Rakyat Indonesia.
- Nurul Wardhani. (2010). Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombang. In *Www.Igra-World.Com* (Vol. 9, Issue 1). <https://doi.org/10.1558/Jsrnc.V4il.24>

- Pratama, D., & Fernos, J. (2010). *Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Pt. Bank Nagari Cabang Padang. Akademi Keuangan Perbankan*, 8.
- Ratnaningtyas, W. (2016). Evaluasi Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat Untuk Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Kawi Malang). *39(2)*, 24–33.
- Satori, D., & Komariah, A. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Keenam. Alfabeta. Bandung.*
- Shanty Dwiani. (2018). Strategi Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Bri Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis Jakarta. 1–146.
- Sugiyono, S. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Dan R&D. Alfabeta Bandung.*
- Umar, H. (2005). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Edisi Baru. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Widiastuti, R., & Rita, M. R. (2017). Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdampak Pada Kinerja Usaha?: Studi Pada Umkm Makanan Ringan Di Kota Salatiga. *Jurnal Visi Manajemen*, 2(2), 100–115.
- Yuliana Safitri, Titin Ruliana, R. M. (2016). Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Air Putih Cabang Samarinda. *Tetrahedron Letters*, 11(3), 296–300.